



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Alamat Jl.Argulobang No. 19, Kode Pos 55225 Telepon (0274) 588518 Faksimile (0274) 512447
Pos-el dlhk@jogjaprovo.go.id Laman dlhk.jogjaprovo.go.id

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 91 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN KESATU ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa dalam melaksanakan program, kegiatan, dan subkegiatan, Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menunjuk pejabat pada SKPD atau Unit Kerja selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta selaku Pengguna Anggaran (PA) tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun

Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 493/KEP/2024 tanggal 20 Desember 2024 tentang Pelimpahan Wewenang Pengelolaan Keuangan Daerah/ Barang Milik Daerah Kepada Sekretaris Daerah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset, dan Kepala Perangkat Daerah;
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 111 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanggal 30 Desember 2022;
10. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

- 11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- 12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor: DPPA/A.2/2.11.3.28.0.00.02.0000/001/2025 tanggal 25 April 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERUBAHAN KESATU ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2025, dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit Kerja kepada PA/KPA
 - b. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan; dan
 - c. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub Kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, PPTK bertanggungjawab kepada Pengguna

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2025.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 19 Mei 2025

KEPALA DLHK,



KUSNO WIBOWO

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur DIY;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 91 TAHUN 2025
TANGGAL : 19 Mei 2025
TENTANG
PERUBAHAN KESATU ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)	JABATAN DALAM INSTANSI	KODE PROG	KODE KEG	KODE SUB KEG	PROGRAM / KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
I	SEKRETARIAT					
1	Wahyu Prasetyo Aji, S.T.P., M.Si. NIP. 198510072010011004	Penelaah Teknis Kebijakan	2.11.01	* 1.01	* * 0001 0004 0007	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	Yuning Zulaikha, S.Hut., M.Sc. NIP. 196910251997032005	Kepala Subbagian Keuangan		1.02	* 0001 0003 0005 0007	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
3	Melani Astari, S.Hut., M.M.A. NIP. 197906192005012013	Kepala Subbagian Umum		1.03	* 0006	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

				1.06	*	Administrasi Umum Perangkat Daerah
					0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
					0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
					0003	Penyediaan Peralatan rumah Tangga
					0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
					0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan
					0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				1.07	*	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				1.08	*	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
					0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
					0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
				1.09	*	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
					0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
					0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
					0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

II	BIDANG PENAATAN, PENGKAJIAN, DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP					
1	Muchamad Rifqi Sultoni, S.IP NIP. 197705171998031004	Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	2.11.0 2 2.11.0 6	* 1.01 * 1.01	* * * *	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP "Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi" Penyusunan RPPLH Provinsi PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
2	Arini ST NIP. 198110032010012018	Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda		1.01	* 0006	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
3	Mita Wijayanti Dyah Pratiwi, SP NIP. 197404201999032003	Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	2.11.0 9	* 1.01	* * 0001	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi

			2.22.08	* 5.09	* * 0009	Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam PPLH PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat
--	--	--	---------	---------------	------------------------	---

III	BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					
1	Eni Yuniarti, ST, M.Eng NIP. 198406042009022004	Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	2.11.08	* 1.01	* * 0005	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi Peningkatan kapasitas dan kompetisi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Pendidikan formal/Lembaga Masyarakat/komunikasi/ Masyarakat PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan
			2.11.05	* 1.01	* * 0001	

						Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2	Radhita Matardi Wicaksono, S.Hut NIP. 197803212000031003	Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	2.11.03	* 1.01 1.02	* * 0001 0002 * 0003	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

IV	BALAI LABORATORIUM LINGKUNGAN					
1	Nuzulia Qurniasih,S.Si.,M.Sc. NIP. 198406172009022005	Kepala Seksi Pengujian	2.11.03	* 1.01	* * 0015	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi

V	BIDANG REHABILITASI, KONSERVASI ALAM DAN PERLINDUNGAN HUTAN					
1	Fery Maryulianti, S.P. NIP. 197403012000032005	Kepala Bidang Rehabilitasi, Konservasi Alam dan Perlindungan Hutan	3.28.03	* 1.04	* * 0001	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)

					0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara
					0012	Pembangunan gully plug
				1.05	*	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
					0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan
			3.28.04	1.04	*	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara
				*	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara
				*	*	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA
				1.03	*	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
					0006	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi
					0009	"Perencanaan Pengelolaan Ekosistem Lahan Basah"

VI	BALAI PENGELOLAAN SAMPAH					
1	Aris Prasena, S.Si, M.Si NIP. 197802182006041002	Kepala Balai Pengelolaan Sampah	2.11.11	*	*	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
				1.01	*	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
					0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/ TPST Regional
2	Sudjanarko, S.ST NIP. 197105181999031005	Kepala Seksi Sarana dan Pengembangan Kerjasama Pengelolaan		1.01	*	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
					0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah

		Sampah				di TPA/TPST Regional
--	--	--------	--	--	--	----------------------

VI I	BIDANG PLANOLOGI, PRODUKSI, PERHUTANAN SOSIAL, DAN PENYULUHAN					
1	Antonius Hendrawan E.S., S.Hut. NIP. 197603242005011007	Penyuluh Kehutanan Muda	3.28.05	*	*	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan 0004 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan 0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan
			3.28.03	*	*	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi 0007 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan
				1.07	*	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/ tahun 0004 Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi 0006 Pemantauan Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) untuk PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan

						provinsi
--	--	--	--	--	--	----------

VIII	BALAI TAMAN HUTAN RAYA (TAHURA) BUNDER					
1	Bambang Sugeng Riyanto, S.Hut. NIP. 197007171993021003	Kepala Seksi Pemanfaatan Hutan	3.28.04	*	*	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi
				1.01	*	
2	Anton Suhono, S.Hut.T NIP. 197303181993031003	Kepala Seksi Perencanaan, Restorasi dan Reboisasi		1.01	*	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi Pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa beserta habitatnya di Tahura Provinsi

IX	BALAI PERBENIHAN KEHUTANAN					
1	Yunanto Jati Laksono, S.S.i NIP. 197206242008011005	Penelaah Teknis Kebijakan	3.28.03	*	*	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN Perbenihan Tanaman Hutan Sertifikasi Sumber Benih Sertifikasi Mutu Benih Sertifikasi Mutu Bibit Pengawasan Peredaran Benih dan/ atau Bibit
				1.09	*	
					0002	
					0003	
					0004	
					0005	
2	Ratih Artanti, S.P., M.Acc. NIP. 198005212006042001	Penyuluh Kehutanan Muda	2.22.08	1.09	*	Perbenihan Tanaman Hutan Pengelolaan Sumber Benih
				*	*	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
				5.08	*	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya
					0006	Pengembangan Wana

						Wisata Budaya Mataram
X	BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN					
1	Sari Utami, S.Hut NIP. 197904082014022001	PEH Ahli Muda	3.28.03	* 1.02 1.03 1.05	* * * * *	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi (KPH) Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan (KPH)
2	Supriyono, SP NIP. 196808091992031005	Kepala Seksi Pemanfaatan Hutan		1.03	* 0013	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi (KPH)
3	Fittri Yani Sumirat, S.Si.,M.Eng NIP. 198108012005012006	Pengendali Ekosistem Hutan Muda	2.11.01	* 1.02	* * 0003	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi

				1.03	*	Keuangan SKPD (KPH)
					0006	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (KPH)
				1.06	*	Administrasi Umum Perangkat Daerah 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor (KPH)
					0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (KPH)
					0003	Penyediaan Peralatan rumah Tangga (KPH)
					0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (KPH)
					0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
					0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (KPH)
				1.08	*	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa
					0001	Surat Menyurat (KPH)
					0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (KPH)
					0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (KPH)
				1.09	*	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan
					0002	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (KPH)
						Pemeliharaan Mebel (KPH)
					0005	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

					0006	Lainnya (KPH) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (KPH)
					0009	

KEPALA DLHK,



KUSNO WIBOWO